Volume 3 Nomor 2 (2025) 222 - 232 E-ISSN 2986-5395 DOI: 10.47467/comit.v3i2.6767

Pengaruh Politik Kekuasaan Terhadap Pengembangan Pendidikan Islam di Era Safawi dan Mughal

Ahmad Rifai, Irhamni Sabil Abdillah, Aqilatun Arum, Siti Alifah Ailatun Nasuha, Faiz Fikri Al Fahmi

Unisversitas Islam Syekh Yusuf Tangerang ra92669973@gmail.com, irhamnisabil12@gmail.com, aqilatunarum71@gmail.com, sitialifah294@gmail.com, ffikri@unis.ac.id

ABSTRACT

The golden age of the Syafavid and Mughal empires was the main highlight of Islamic civilization, where the political success of the kingdoms also influenced the progress of Islamic education. Islamic education has an important role in maintaining and developing the Islamic identity of a civilization. During the Safavid kingdom, Islamic civilization reached its peak in the fields of art, literature and architecture. The influence of power politics plays a key role in supporting the development of Islamic education by building advanced educational institutions centered on Islamic teachings. Islamic education at that time provided a strong foundation for the intellectuality of Muslims. Meanwhile, the period of Mughal rule also showed the glory of Islamic civilization. Islamic education under Mughal rule experienced significant development, where classical books were translated into local languages to increase access to education for the wider community. Mughal political power gave great impetus to the spread of Islamic science and religion.

Keywords: Power Politics, Syafavid Empire, Mughal Empire, Educational Development.

ABSTRAK

Masa keemasan kerajaan Syafawi dan Mughal menjadi sorotan utama dalam peradaban Islam, di mana keberhasilan politik kerajaan turut memengaruhi kemajuan pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam menjaga dan mengembangkan identitas keislaman suatu peradaban. Pada masa kerajaan Syafawi, peradaban Islam mencapai puncak kejayaan dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur. Pengaruh politik kekuasaan memainkan peran kunci dalam mendukung perkembangan pendidikan Islam dengan membangun institusi-institusi pendidikan yang maju dan berpusat pada ajaran Islam. Pendidikan Islam pada masa tersebut memberikan landasan kuat bagi intelektualitas umat Islam. Sementara itu, masa kekuasaan Mughal juga menunjukkan kegemilangan peradaban Islam. Pendidikan Islam di bawah pemerintahan Mughal mengalami perkembangan signifikan, di mana kitab-kitab klasik diterjemahkan ke dalam bahasa lokal untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat luas. Kekuasaan politik Mughal memberikan dorongan besar terhadap penyebaran ilmu pengetahuan dan agama Islam.

Kata Kunci: Politik Kekuasaan, Kerajaan Syafawi, Kerajaan Mughal, Pengembangan Pendidikan.

Volume 3 Nomor 2 (2025) 222 - 232 E-ISSN 2986-5395 DOI: 10.47467/comit.v3i2.6767

PENDAHULUAN

Dinamika politik dan kebijakan yang diterapkan oleh para penguasa sangat erat kaitannya dengan pengaruh politik kekuasaan terhadap perkembangan pendidikan Islam di dunia Islam. Pada abad ke-16 hingga ke-17, dua kekaisaran besar yang berpengaruh dalam perjalanan sejarah Islam adalah Dinasti Safawi yang berpusat di Persia (sekarang Iran) dan Kekaisaran Mughal yang berkuasa di wilayah India. Kedua kerajaan ini terkenal karena kekuatan militer dan budaya mereka, serta karena membantu membangun sistem pendidikan Islam yang berkembang pesat selama pemerintahan mereka.

Pendidikan Islam di Persia mengalami perkembangan besar selama dinasti Safawi, yang menciptakan negara Syiah sebagai identitas negara. Penguasa Safawi sangat memperhatikan pendidikan agama, mendirikan madrasah, dan memungkinkan ajaran Syiah disebarkan melalui lembaga pendidikan. Pendidikan Islam berkembang dalam bentuk yang lebih inklusif di bawah pemerintahan dinasti Mughal, yang memerintah India yang memiliki banyak agama yang berbeda. Banyak madrasah didirikan yang berkonsentrasi tidak hanya pada ajaran agama, tetapi juga pada ilmu pengetahuan duniawi seperti sastra, matematika, dan astronomi.

Politik kekuasaan di kedua kerajaan ini memberikan landasan bagi pengembangan pendidikan Islam dengan mendirikan lembaga pendidikan, merekrut ulama-ulama terkemuka, dan mendukung pengajaran ilmu agama yang sesuai dengan kebutuhan politik dan sosial pada saat itu. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana kekuasaan politik di masa Safawi dan Mughal tidak hanya mempengaruhi arah kebijakan pendidikan, tetapi juga memperkaya tradisi intelektual Islam melalui penciptaan sistem pendidikan yang mampu menjawab tantangan zaman.

METODE PENELITIAN

Metode historis: Topik ini berkaitan dengan perkembangan Pendidikan islam pada dua dimensi besar yaitu: Dinasti Safawi di Persia (1501-1736) dan dinasti Mughal di india (1526-1736). Dengan demikian, sangat krusial untuk menerapkan pendekatan sejarah ketika mempelajari keterkaitan antara dinamika politik kekuasaan dan *education* Islam. Metode Kualitatif: Metode ini akan membantu menganalisis data kualitatif dari sumber sejarah. Sumber-sumber ini termasuk dokumen tertulis, kronik, surat kabar, atau literatur Islam yang ditulis selama era Safawi dan Mughal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peradaban islam pada masa kerjaan safawi

Kerajaan Safawi yang terletak di Persia eksis dari tahun 1503 hingga 1722 M, seiring dengan puncak kejayaan Kesultanan Usmani. Keberadaannya bermula dari sebuah gerakan spiritual yang berkembang di Ardabil, sebuah kota yang berada di kawasan Azerbaijan. Tarekat tersebut menganut aliran

Volume 3 Nomor 2 (2025) 222 - 232 E-ISSN 2986-5395 DOI: 10.47467/comit.v3i2.6767

Syiah dan setia pada Musa al-Kazim, yang merupakan keturunan ketujuh dari Kerajaan (Lapidus, 2000).

Tarekat Safawiyah lahir hampir bersamaan dengan berdirinya Kekaisaran Usmani. Institusi ini pertama kali didirikan oleh Syafial-Din (1252–1334), dan hingga organisasi ini berubah menjadi sebuah gerakan politik, nama Safawiyah tetap melekat. Bahkan setelah gerakan tersebut berhasil mendirikan sebuah kerajaan, nama tersebut terus dipertahankan. Ismail dikenal sebagai pendiri Dinasti Safawi di Persia. Kemajuan ekonomi Safawi tercapai berkat stabilitas politik yang diciptakan oleh Raja Abbas I, terutama setelah wilayah Kepulauan Hurmuz berhasil dikuasai dan Pelabuhan Gumrun diubah menjadi Bandar Abbas (Ismi Lathifah, 2021).

Kerajaan Safawi mencapai perkembangan pesat dalam bidang pertanian, terutama di kawasan *Fertile Crescent*, selain mengalami kemajuan signifikan dalam perdagangan. Dalam perjalanan sejarah Islam, Persia dikenal sebagai daerah yang makmur dan memiliki kemajuan pesat dalam bidang *science* dan pengetahuan. Tradisi intelektual ini terus dilestarikan selama masa pemerintahan kerajaan Safawi. Banyak cendekiawan berkontribusi dalam forum-forum istana. Di antaranya adalah Bahaal-Din al-Syerazi, yang mendalami berbagai cabang ilmu; Sadr al-Din al-Syerazi, seorang filsuf terkemuka; serta Muhammad Baqir ibn Muhammad Damad, yang merupakan filsuf, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengamati kehidupan lebah (Miftah al-Farouqy, 2021).

a) Bidang politik dan pemerintahan

Dalam konteks ini, perkembangan politik merujuk pada terciptanya wilayah yang luas dan terpadu, dilindungi oleh kekuatan militer yang tangguh, serta dikelola oleh pemerintahan yang stabil dan mampu memainkan peran signifikan dalam dinamika politik internasional. Syah Abbas I memulai upayanya di ranah politik dengan membangun kekuatan militer Dinasti Safawi yang besar, modern, dan kuat, sejalan dengan pandangan umum bahwa kekuatan sebuah negara sering kali diukur dari kemampuan militernya. Syah Abbas memahami bahwa pasukan Qizilbasy, yang sebelumnya menjadi tulang punggung kekuatan militer Safawi, tidak lagi bisa diandalkan. Oleh karena itu, ia membentuk pasukan reguler baru. Pasukan inti ini terdiri dari para tawanan perang, yang sebagian besar berasal dari komunitas Kristen di Georgia dan Chircassia. Setelah itu, mereka menerima pendidikan militer yang ketat dan dilengkapi dengan senjata canggih. Allahwardi Khan, salah satu dari para Ghulam, diangkat sebagai komandan pasukan oleh Syah Abbas (Maryam, S. 2023).

Melalui usaha kerasnya, Syah Abbas mampu menghadapi berbagai tantangan yang mengancam kestabilan negara sekaligus merebut wilayah yang sebelumnya jatuh ke tangan kerajaan lain. Kepemimpinan penguasa Dinasti Safawi, khususnya Syah Abbas I, yang dikenal memiliki pandangan jauh ke depan, semangat membara,

Volume 3 Nomor 2 (2025) 222 - 232 E-ISSN 2986-5395 DOI: 10.47467/comit.v3i2.6767

keberanian luar biasa, tekad bulat, dan ketekunan yang tiada henti, menjadi salah satu alasan utama kokohnya Dinasti ini. Kesetiaan pasukan Qizilbasy terhadap raja Safawi juga merupakan faktor penting dalam kekuatan politik dinasti (Smi Lathifah, 2021).

b) Bidang Ekonomi

Ekonomi Kerajaan Safawi mengalami kemajuan besar selama pemerintahan Syah Abbas. Ini terutama berlaku untuk industri dan perdagangan. Stabilitas politik pada masa pemerintahan Abbas I memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi Kerajaan Safawi. Salah satu faktor pendukungnya adalah keberhasilan mereka menguasai wilayah kepulauan Hurmuz serta mengembangkan pelabuhan Gumrun menjadi Bandar Abbas. Pelabuhan ini kemudian menjelma menjadi rute perdagangan strategis yang menghubungkan Timur dengan Barat. Meski sering menjadi rebutan di antara negara-negara seperti Netherlands, England, dan France, akhirnya wilayah tersebut tetap berada di bawah kendali Kerajaan Safawi.

Kemajuan yang terlihat dalam sektor ekonomi antara lain:

- 1) Aktivitas perdagangan yang ramai melalui Teluk Persia serta ekspor Safawi yang meningkat, terutama komoditas sutra.
- 2) Perdagangan luar negeri yang lancar, terutama dengan Inggris, yang membuat para pedagang Portugis marah. Portugal mencoba mencegah kapal dagang Inggris menuju Persia Safawi, yang menyebabkan pertempuran. Saat Safawi memberikan dukungan kepada Inggris dalam konflik tersebut, basis Hurmuz berhasil dikuasai oleh Safawi, yang kemudian mendorong peningkatan aliran perdagangan menuju wilayah mereka.
- 3) Perbaikan di bidang pertanian, khususnya yang berkaitan dengan peternakan ulat sutra, yang mengarah pada peningkatan produktivitas pertanian.

Sebagai tambahan, pembangunan infrastruktur seperti bridge, jalur angkutan, pusat trade, serta rute lebar yang menghubungkan kawasan timur laut Kaspia dengan wilayah barat, memberikan kemudahan dalam aktivitas perdagangan (Yatim, 2023).

2. Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Safawi

a) Latar Belakang Berdirinya Kerajaan Safawi

Isfahan, yang awalnya direncanakan sebagai pusat kerajaan, berkembang pesat menjadi sebuah kota yang mempesona, dihiasi dengan taman-taman yang indah yang mampu menarik perhatian siapa saja. Pada saat wafatnya Abbas I, kota ini sudah memiliki 162 tempat ibadah, 48 institusi pendidikan, 1802 penginapan, serta 273 fasilitas public bath atau pemandian umum. Dari segi seni, pencapaian besar terlihat dalam desain arsitektur bangunan-bangunan penting, seperti Masjid Syah yang

Volume 3 Nomor 2 (2025) 222 - 232 E-ISSN 2986-5395 DOI: 10.47467/comit.v3i2.6767

mulai dibangun pada tahun 1611 dan Masjid Syaikh Lutf Allah yang sudah berdiri sejak tahun 1603 (Yatim, 2008).

Keputusan dinasti Safawi untuk jatuh dipicu oleh berbagai sebab, termasuk ketegangan internal di dalam keluarga kerajaan mengenai perebutan kendali atas kekuasaan. Para pengganti Abbas I umumnya tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan kekuasaan. Pada Agustus 1732, Tahmasp II digulingkan oleh Nadir Khan, dan digantikan oleh Abbas III, putra Tahmasp II yang masih belia. Peristiwa ini ternyata merupakan bagian dari strategi politik Nadir Khan, yang pada 8 Maret 1736, mengklaim dirinya sebagai penguasa baru Persia dan menggantikan Abbas III. Dengan demikian, berakhirlah era kejayaan dinasti Safawi di Persia.

b) Keadaan Pendidikan Pada Masa Kerajaan Safawi diPersia

Bangsa Persia tercatat dalam sejarah sebagai salah satu peradaban yang memiliki kemajuan pesat dan memberikan andil besar dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Karena itu, era Kerajaan Safawi dianggap sebagai waktu yang penuh dengan warisan intelektual yang terus berkembang hingga sekarang.

Pada masa Dinasti Safawi, kegiatan pendidikan dan kehidupan intelektual secara umum difokuskan untuk memperkuat ajaran Syi'ah. Satu sisi, ajaran Syi'ah disebarluaskan dengan sangat intensif ke seluruh lapisan masyarakat dan daerah untuk memperkuat kekuasaan para Syah. Sementara itu, di sisi lain, penguatan sistem birokrasi dan penerapan kekerasan militer menjadi sarana utama dalam memperkokoh keyakinan terhadap ajaran tersebut.

Selama masa kekuasaan Dinasti Safawi, ada tiga bentuk pendidikan yang memiliki dampak besar terhadap cara pengajaran dan sistem yang diterapkan. Pertama, pendidikan yang bertujuan untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran Syi'ah, yang menjadi prioritas di semua institusi pendidikan, dengan harapan dapat meningkatkan rasa kebangsaan dan mendukung mazhab agama tersebut. Kedua, pendidikan yang berfokus pada seni, yang menekankan pada kreativitas dan keindahan, dengan tujuan mendongkrak perkembangan sektor industri dan perdagangan pada masa itu. Ketiga, pendidikan yang ditujukan untuk membentuk kekuatan militer, dengan fokus memperkuat angkatan bersenjata.

Selama era Kekaisaran Safawi, banyak intelektual terkenal yang sering hadir di istana, seperti Baha al-Din al-Syirazi, seorang filsuf terkemuka, serta Muhammad Bagir Ibn Muhammad Damad, yang dikenal sebagai seorang filsuf, sejarawan, teolog, dan peneliti tentang kehidupan lebah. Jika dibandingkan dengan dua kekaisaran besar lainnya pada waktu itu, yakni Usmani dan Mughal, Kekaisaran Safawi lebih menonjol dalam kemajuan ilmu pengetahuan.

Volume 3 Nomor 2 (2025) 222 - 232 E-ISSN 2986-5395 DOI: 10.47467/comit.v3i2.6767

Keemasan dalam dunia pendidikan dan pengetahuan di bawah Kerajaan Safawi tercapai pada masa pemerintahan Syah Abbas I. Selama periode pemerintahannya, sebanyak 162 masjid dan 48 lembaga pendidikan didirikan. Beberapa catatan menunjukkan bahwa banyak di antara institusi tersebut didirikan oleh keluarga kerajaan. Dilaram Khanum, nenek dari Syah Abbas II, mendirikan dua madrasah, yaitu Madrasah Kecil pada tahun 1645-1646 dan Madrasah Besar pada tahun 1647-1648. Selain itu, madrasah Nim Avard yang dibangun oleh Zinat Begum, istri dari ilmuwan Hakim al-Mulk Ardistani, selesai pada tahun 1705-1706.

Pemerintah turut mendukung kemajuan budaya pengetahuan melalui sistem pendidikan di tingkat universitas. Sebagai contoh, di kota Qum, terdapat banyak lembaga pendidikan, seperti akademi, institut, universitas, dan fasilitas riset lainnya. Selain itu, kota ini juga memiliki perpustakaan besar yang menyimpan sekitar satu juta buku berisi karya ilmiah.

Pada masa dinasti Safawi, perempuan memiliki kebebasan yang lebih besar untuk menunjukkan eksistensinya serta mengambil bagian dalam berbagai sektor kehidupan—termasuk sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Terdapat peningkatan perhatian terhadap pendidikan perempuan, dengan beberapa anggota keluarga kerajaan dan kaum bangsawan aktif dalam mendirikan berbagai lembaga pendidikan, seperti madrasah dan majelis ilmu (Ahmad, 2000).

Beberapa tokoh utama dalam perkembangan intelektual Kerajaan Safawi antara lain Baha al-Din al-Syirazi, yang merupakan pelopor dalam bidang science, Mulla Sadra atau Sadr al-Din al-Syirazi (seorang philosopher), serta Muhammad Baqir Ibn Muhammad Damad, yang dikenal sebagai seorang philosopher, sejarawan, dan teolog. Karyakarya mereka, seperti dua belas tulisan dari Mulla Sadra, meliputi penafsiran dan komentar terhadap Al-Qur'an, pembahasan tradisi, perdebatan teologis, metafisika, dan catatan-catatan perjalanan mereka.

3. Peradaban Islam Pasa Masa Kerajaan Mughal

Meskipun Kerajaan Safawi muncul sekitar 25 tahun setelahnya, Kerajaan Mughal bukanlah kekuasaan Islam pertama yang hadir di wilayah India. Sejak masa pemerintahan Khalifah al-Walid dari Dinasti Bani Umayyah, pengaruh Islam mulai merambah ke anak benua tersebut. Tentara Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muhammad ibn Qasim berhasil menaklukkan daerah India pada waktu itu (Lubis, 2021). Qutb-ud-din Aibak (1206-1211) mendirikan sebuah dinasti Islam yang berdiri sendiri di India. Setelah merasa cukup kuat untuk menguasai wilayah tersebut, ia mendirikan Kesultanan Delhi pada tahun 1206 yang berlangsung hingga tahun 1290. Karena Aibak tidak berasal dari garis keturunan kerajaan, dinasti yang berasal darinya sering dikenal dengan julukan *slave kings* atau raja-raja hamba. Sultan Balban

Volume 3 Nomor 2 (2025) 222 - 232 E-ISSN 2986-5395 DOI: 10.47467/comit.v3i2.6767

adalah penguasa terakhir dari dinasti ini. Pada tahun 1290, dinasti Khilji mengambil alih kekuasaan di Kesultanan Delhi dan berkuasa hingga tahun 1321. Setelah itu, dinasti Tughlaq memerintah dari tahun 1321 hingga 1399, diikuti oleh dinasti Sayyid (1414-1451), dinasti Lodi (1451-1526), dan akhirnya dinasti Mughal yang memerintah setelahnya.

a) Bidang politik dan admistrasi pemerintahan

Dengan menerapkan kebijakan politik Sulakhul, yang juga dikenal sebagai toleransi universal, ia mencapai masa kejayaan selama pemerintahan Akbar. Sebagai hasil dari kebijakan ini, pemerintahannya menjadi cukup efektif dan wilayahnya menjadi lebih besar. Ini mencakup Chubdar, Ghond, Chitor, Kashmir, Bengal, Bihar, Gujarat, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah. Selama pemerintahan Aurangzeb, usaha ini berlanjut. Banyak kebijakan dibuat selama pemerintahan Akbar, salah satunya adalah membangun sistem militer untuk pemerintahan dan seluruh wilayah taklukannya. Sipah salar, atau kepala komandan, mengelola pemerintahan daerah, dan faudjar, atau komandan subdistrik, mengelola pemerintahan subdistrik. Selain itu, dasar institusional dan geografis untuk kekuatan imperiumnya dibangun. Menurut Thohir (2004), elit militer dan politik seperti Iran, Turki, Afghanistan, dan Muslim asli India bertanggung jawab atas pemerintahan Mughal.

b) Bidang agama

Karena India dihuni oleh dua agama besar: Islam dan Hindu, masuknya Islam menimbulkan konflik kepercayaan yang kompleks. Penguasa Islam berusaha memastikan keadilan dalam tindakan agama mereka, tetapi mereka seringkali menghadapi kecurigaan politik dan kesalahpahaman. Pada tahun 1582 M, Sultan Akbar menciptakan Din Illahi untuk menciptakan harmoni, tetapi ulama Islam tidak menyukai upaya ini. Selain itu, dengan mengambil seorang istri Hindu, dia mencoba meredakan konflik antara Islam dan Hindu. Meskipun ada konflik terkait kasta, perkembangan Islam di India pada akhirnya menguntungkan, termasuk aliran seperti Syi'ah. Hukum Islam sangat ketat pada masa Aurangzeb. Pertentangan antara ajaran Islam dan Hindu melahirkan suatu keyakinan baru yang kemudian berkembang pesat menjadi agama besar di India. Agama Sikh lahir sebagai sintesis dari unsur-unsur Islam dan Hindu pada abad ke-15, dengan Guru Nanak (1469-1539 M) sebagai tokoh sentral pendirinya. Meskipun agama ini menghadapi berbagai tantangan dari agama lain sepanjang perjalanan sejarahnya, Sikhisme akhirnya berhasil mengukir identitasnya yang kokoh di wilayah Asia Selatan.

c) Bidang ekonomi

Ekonomi Kerajaan Mughal sangat bergantung pada hasil pertanian seperti rempah-rempah, kapas, nila, dan padi, yang menjadi komoditas utama. Hasil pertanian ini, bersama produk kerajinan tangan

Volume 3 Nomor 2 (2025) 222 - 232 E-ISSN 2986-5395 DOI: 10.47467/comit.v3i2.6767

seperti kain tenun dan tekstil, diperdagangkan ke berbagai penjuru dunia, termasuk Europe, Africa, Arab, dan Asia Tenggara. Gujarat dan Bengal menjadi pusat utama industri tekstil. Pada tahun 1611, Jehangir memberikan izin kepada Inggris, dan Belanda pada tahun 1617, untuk mendirikan pabrik pengolahan hasil pertanian di Surat, yang meningkatkan kapasitas produksi. Keberhasilan sektor ini terus dilanjutkan oleh ketiga sultan berikutnya, yaitu Jehangir (1605-1628), Shah Jehan (1628-1658), dan Aurangzeb (1658-1707). Kekuatan militer dan pengaruh politik mereka memperkuat keberhasilan kerajaan. Namun, setelah pergantian raja, Kerajaan Mughal mengalami kemunduran (Prayogi, 2023).

Dalam aspek ekonomi, kekaisaran Mughal berfokus pada penguatan sektor pertanian, pertambangan, dan perdagangan. Meskipun demikian, sektor yang paling menyumbang pendapatan mereka adalah pertanian. Oleh karena itu, pemerintah Mughal membentuk struktur pemerintahan lokal untuk mengelola hasil pertanian dan melindungi para petani. Wilayah terkecil disebut De, yang beberapa bagiannya bergabung dalam Pargana (semacam unit administratif pertanian yang setara dengan Kawedanan). Setiap Pargana dipimpin oleh seorang pejabat lokal yang disebut mukadam atau patel. Jabatan ini diwariskan secara turun-temurun, dan mukadam bertanggung jawab untuk menyetor pajak dan menjaga ketertiban. Mereka dilindungi oleh hak kepemilikan tanah dan hak waris, meskipun mereka juga terikat oleh kewajiban tersebut.

4. Pendidikan Islam Pada Masa Kerajaan Mugha

a) Keadaan Pendidikan Pada Masa Kerajaan Mughal

Pada masa pemerintahan Kerajaan Islam Mughal, sektor pendidikan mendapat perhatian yang sangat besar. Pemerintah sangat mendukung keberadaan masjid sebagai pusat pembelajaran agama bagi masyarakat. Di dalam masjid, ulama mengajarkan berbagai cabang ilmu agama, dan beberapa masjid bahkan menyediakan fasilitas untuk santri yang ingin tinggal dan lebih mendalami ilmu agama. Khanqah (pondok pesantren) adalah lembaga pendidikan yang dikelola oleh ulama atau pengajar pribadi di daerah yang terpencil. Kurikulum yang diajarkan di sana mencakup banyak bidang ilmu, seperti mathematics, logic, filsafat, tafsir Al-Qur'an, hadis, fiqih, sejarah, dan geografi. Bahasa Persia digunakan sebagai *medium* utama dalam pengajaran ilmu agama Islam. Pendidikan di Kerajaan Mughal dapat dibagi dalam dua tahap: klasik dan modern. Pada tahap klasik, kemajuan pendidikan berkembang pesat, terutama dalam bidang pengetahuan agama, politik, peradaban, serta sains dan filsafat. Namun, pada fase modern, pengembangan ilmu agama cenderung lebih pada peniruan terhadap tradisi yang ada pada periode

Volume 3 Nomor 2 (2025) 222 - 232 E-ISSN 2986-5395 DOI: 10.47467/comit.v3i2.6767

klasik Islam. Oleh karena itu, tidak banyak ijtihad yang muncul secara mandiri, dan jika ada, umumnya ijtihad tersebut terbatas dalam ruang lingkup mazhab tertentu (*ijtihad fi'l al-madhhab*). Di antara ilmu-ilmu yang berkembang pesat pada masa klasik Kerajaan Mughal adalah ilmu hadis, ilmu Al-Qur'an, tasawuf, *at-Shib*, filsafat, ilmu eksakta/zoologi, ilmu tabiyat (pengetahuan alam), ilmu militer, berburu, berkuda, serta ilmu politik dan pemerintahan.

b) Sistem dan Kelembagaan Pendidikan Pada Masa Dinasti Mughal

Selama periode kekuasaan Dinasti Mughal, sektor pendidikan menerima perhatian yang signifikan. Pemerintah pada masa itu mendorong penggunaan masjid tidak hanya untuk kegiatan ibadah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan agama bagi penduduk sekitar. Di dalam masjid, para ulama memberikan pengajaran mengenai berbagai bidang ilmu agama. Beberapa masjid bahkan menyediakan fasilitas tempat tinggal bagi santri yang ingin menetap dan mendalami ilmu di sana. Sebagai hasilnya, hampir setiap masjid menjadi tempat pengembangan pengetahuan agama dengan para guru yang ahli di bidangnya. Dalam perjalanan sejarah Dinasti Mughal, dua pemimpin besar muncul, yaitu Akbar Khan dan Aurangzeb. Meski memerintah pada waktu yang berbeda, kebijakan keduanya sangat berhubungan, terutama dalam upaya memperkuat Islam di India. Akbar mengembangkan konsep Islam yang lebih terbuka dan mengakomodasi berbagai pengaruh, sementara Aurangzeb menegakkan prinsip-prinsip Islam yang lebih ketat. Aurangzeb, berbeda dengan Akbar, menekankan kembali aspek Islam yang kuat di India. Ia berupaya mengembalikan kejayaan Islam yang mulai memudar dan memperjuangkan kemurnian ajaran Islam. Meskipun niatnya menunjukkan kecintaan yang mendalam terhadap agama Islam, kita harus mengingat bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian tanpa paksaan dan tidak membenarkan kekerasan terhadap orang-orang yang menganut agama lain.

Pada masa pemerintahan Kekaisaran Mughal, yang memurnikan ajaran Islam dengan cara menghancurkan tempat ibadah agama lain, berbagai cabang ilmu pengetahuan berkembang pesat. Di antaranya adalah Umran (sosiologi), Falsafah Tariq (filsafat sejarah), serta bidangbidang seperti ilmu politik, administrasi, militer, dan kritik sejarah yang semakin matang berkat karya pertama oleh Muqaddimah ibn Khaldun. Dalam periode ini, sektor pendidikan juga mendapat perhatian besar dan menjadi elemen penting dalam kebijakan pemerintahan. Pada era kepemimpinan Babur (1526-1530), ia mendirikan sebuah sekolah di Dili yang menawarkan pelajaran tidak hanya dalam bidang agama, tetapi juga dalam ilmu seperti matematika, astronomi, dan geografi. Selain itu, Babur juga menciptakan *Department of Public Administration (Shurat-i-Am*) yang bertugas mengelola dan mengembangkan lembaga pendidikan seperti madrasah. Kemudian, di masa pemerintahan Akbar (1556-1605),

Volume 3 Nomor 2 (2025) 222 - 232 E-ISSN 2986-5395 DOI: 10.47467/comit.v3i2.6767

banyak madrasah yang dibangun oleh pemerintah maupun individu. Akbar sendiri mendirikan madrasah di Fatpur Sikri dan Dilli, dengan kurikulum yang mencakup tidak hanya ajaran agama, tetapi juga berbagai disiplin ilmu umum, seperti matematika, geometri, fisika, astronomi, logika, dan sejarah. Berbagai pendekatan dalam metode pendidikan terlihat jelas, dengan berbagai disiplin ilmu diajarkan dengan cara yang beragam. Pada abad ke-18, perhatian terhadap pendidikan semakin meningkat, dimulai oleh Shake Valueler yang mendalami bidang ini, berbarengan dengan munculnya gerakan Muhahidin.

Anak dari Shea Abdul Azis, yang dikenal dengan Gerakan Mujahidin, diteruskan oleh penerusnya. Kemudian, Sir Sayyid Ahmad Khan menyatakan bahwa untuk meraih kemajuan yang sesungguhnya, seseorang perlu kembali pada ajaran Islam yang murni, yang dapat dicapai melalui pemahaman yang benar terhadap *Al-Qur'an* dan *Hadits*, membersihkan tauhid dari segala bentuk kemusyrikan, serta menjauhi praktik *taqlid*. *Ijtihad* menjadi landasan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang penafsiran *Al-Qur'an* dan *Hadits*.

KESIMPULAN

Setelah mengkaji pengaruh politik kekuasaan terhadap pengembangan pendidikan Islam di period Syafawi dan Mughal serta peradaban Islam pada masa kekuasaan kedua kerajaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik kekuasaan memainkan peran yang sangat signifikan dalam kemajuan pendidikan Islam dan peradaban Islam secara keseluruhan. Di period Syafawi, kebijakan politik kekuasaan mendukung pembangunan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas, memberikan landasan kuat bagi kemajuan intelektual umat Islam pada masa itu. Sementara itu, periode keemasan Mughal juga menunjukkan betapa pentingnya peran politik kekuasaan dalam mengembangkan pendidikan Islam melalui terjemahan kitab-kitab klasik dan penyebaran ilmu pengetahuan.

SARAN

Saran yang dapat diambil dari analisis ini adalah perlunya sinergi yang kuat antara politik kekuasaan dan lembaga pendidikan Islam. Pemerintahan seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan sistem pendidikan Islam yang inklusif, inovatif, dan berbasis pada nilai-nilai Islam yang murni. Keterlibatan aktif pemerintah dalam mendukung pendidikan Islam akan menjadi kunci dalam memastikan generasi Islam yang tangguh dan berkontribusi positif bagi perkembangan masa depan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Farouqy, M. (2021). Peradaban Islam pada masa Dinasti-dinasti kecil di Timur Baghdad. *Rihlah: History and Culture*, 9(1), 49.

Volume 3 Nomor 2 (2025) 222 - 232 E-ISSN 2986-5395 DOI: 10.47467/comit.v3i2.6767

- Fauzan, E. H., & Setiawan, A. M. (2022). Lahirnya tiga kerajaan besar Islam pada abad pertengahan (1250-1800 M). *El Tarikh*, 3(1), 57–76.
- Lathifah, I. (2021). Peradaban dan pemikiran Islam pada masa Dinasti Safawi di Persia. *Islamic Education*, 1(2), 54.
- Lathifah, I. (2021). Peradaban dan pemikiran Islam pada masa Dinasti Safawi di Persia. *Islamic Education*, 1(2), 55.
- Lathifah, I., Daulay, H. P., & Dahlan, Z. (2021). Peradaban dan pemikiran Islam pada masa Dinasti Safawi di Persia. *Islamic Education*, 1(2), 54–61.
- Nasron, M., Putri, A. Y., & Mariza, E. (2023). Sejarah peradaban Islam sebagai ilmu pengetahuan. *History of Islamic Civilization as a Science*, 4(2).
- Prayogi, A., Arisandi, D., & Kurniawan, P. C. (2023). Peradaban dan pemikiran Islam di masa tiga kerajaan besar Islam: Suatu telaah historis. *Al Irsyad: Jurnal Studi Islam*, 2(1), 1–12.
- Yamani, S., Santalia, I., & Wahyudi. (2022). Sejarah perkembangan dan kemunduran tiga kerajaan Islam abad modern tahun 1700-1800. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).